

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi pendidikan membawa perubahan dalam manajemen madrasah yang memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk berpartisipasi. Madrasah dalam hal ini melakukan pemberdayaan kepada *stakeholders* untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal tidak bisa terlepas dari kebijakan reformasi pendidikan yang sifatnya desentralistik (Kunandar, 2011). Pengelolaan pendidikan di lingkungan sekolah merupakan bentuk manajemen madrasah dengan memberikan otonomi yang luas terhadap madrasah dengan ditandai semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dengan adanya pelimpahan wewenang melalui otonomi daerah.

Sehubungan dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah diberbagai bidang, kementerian pendidikan ikut melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 menekankan pada pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi dewan perwakilan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut terkait dengan kebijakan peningkatan mutu berbasis madrasah, menekankan agar madrasah mampu mengkoordinasikan dan menyeraskan segala sumber daya yang ada di madrasah maupun di luar madrasah untuk mewujudkan madrasah yang bermutu.

Pelimpahan wewenang akan melahirkan konsekuensi terhadap pembiayaan yang dapat mendukung dan membantu proses desentralisasi, seperti yang termaktub dalam UU No. 33 Tahun 2004 (Indonesia, Undang-Undang , 2004). Undang-undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, transparan, partisipatif, rasional, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, strategi pengelolaan dalam manajemen madrasah yang tepat sangat diperlukan agar dapat mewujudkan pengelolaan yang penuh tanggung jawab sehingga dapat bermanfaat bagi penduduk daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah tidak dapat mengerjakan berbagai kegiatan dengan seorang diri untuk mendapatkan hasil yang maksimal, berhasil guna, dan berdaya guna dalam menangani permasalahan suatu daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi membutuhkan pihak lain (*stakeholders*) pada bidang-bidang yang ada di daerah tersebut, seperti pihak internal madrasah (guru) pihak eksternal madrasah (komite madrasah maupun orang tua siswa). Dengan demikian, koordinasi dan kerja sama yang

diterapkan oleh pemerintah daerah dengan *stakeholders* menjadi sangat penting dalam mewujudkan asas desentralisasi, terutama yang berkaitan dengan sistem pengelolaan atau manajemen sekolah (Arbangi, 2016).

Pengelolaan sekolah merupakan kegiatan yang rumit karena di dalamnya tidak hanya dihadapkan dengan berbagai persoalan internal, tetapi juga persoalan eksternal (Rahman D, 2020). Dengan demikian, sekolah harus dikelola dan diberdayakan dengan baik agar dapat menyandang predikat sebagai sekolah bermutu (Danial, 2019). Manajemen madrasah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pendidikan yang dikelola agar dapat mencapai tujuan sesuai yang diharapkan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Pengelolaan madrasah termasuk dalam komponen yang integral sehingga tidak dapat terpisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Pernyataan tersebut menandakan bahwa madrasah tidak dapat mencapai tujuannya secara optimal, efektif, dan efisien tanpa manajemen yang dilakukan. Mulyasa menjelaskan bahwa sekolah membutuhkan pengelolaan yang efektif dan efisien dan kesadaran akan pentingnya MBS yang memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk mengelola pendidikan dan pengajaran, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pertanggungjawaban, serta mengatur segala sumber daya yang dapat membantu terlaksananya kegiatan pembelajaran seperti tujuan sekolah yang diharapkan (Mulyasa, 2014).

Sistem manajemen sekolah terkait pengelolaan dana diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB XIII (Pendanaan Pendidikan) bagian ketiga pasal 48 ayat (1), bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparan, dan akuntabilitas publik (Indonesia, UUD 1945, 2003). Artinya, sistem pengelolaan dana pendidikan, baik dana sumbernya dari pemerintah maupun yang sumbernya dari masyarakat harus dikelola dengan berlandaskan pada prinsip *transparency* dan *accountability* publik. Melalui pengelolaan dana yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, *stakeholders* dapat mengetahui dan memercayai penggunaan keuangan madrasah. Berdasarkan regulasi tersebut, transparansi dan akuntabilitas adalah sesuatu yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata dalam lembaga pendidikan (madrasah).

Realitas yang terjadi di lapangan terkait sistem pembiayaan dan pengelolaan keuangan pendidikan setelah diberlakukannya sistem otonomi daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Bastian bahwa: a) pengelolaan keuangan yang dilimpahkan dari pusat ke daerah dalam rangka pengelolaan sektor pendidikan, baru mencapai taraf pemenuhan kebutuhan operasional gaji pegawai; b) kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai

sektor pendidikan belum mengalami perbaikan yang signifikan sejak diberlakukannya sistem otonomi tersebut, bahkan masih banyak daerah yang mengalami penurunan; dan c) permasalahan utama pembiayaan pendidikan di era otonomi ini diakibatkan oleh rendahnya akuntabilitas dan transparansi publik di hampir semua level (Bastian, 2010).

Boy & Siringoringo menjelaskan bahwa prinsip transparansi merupakan penjaminan terhadap kebebasan akses bagi setiap orang yang berkepentingan terhadap informasi penyelenggaraan organisasi publik, berupa informasi kebijakan, proses pembuatan kebijakan, serta pencapaian hasil kebijakannya (Boy D, 2009). Oleh karena itu, keterbukaan dan kebebasan akses informasi harus dijalankan madrasah agar proses fungsionalisasi atau keterlibatan *stakeholder* sebagai salah satu pengawas madrasah dapat terjadi dengan sebaik-baiknya, dan madrasah yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola sekolah, dapat dianggap memiliki kinerja yang baik apabila tujuan pendidikan sudah tercapai dalam hal kemandirian dan tanggung jawab (akuntabilitas). Adapun prinsip akuntabilitas merupakan suatu keadaan seseorang yang dinilai oleh orang lain, karena mutu *performance* dalam upaya mencapai tujuan yang menjadi bidang garapan dan tanggung jawabnya (Wibowo, 2013). Sistem pengelolaan keuangan yang berprinsip pada akuntabilitas akan mampu menjadikan madrasah mendapatkan nilai tambah dari pemerintah dan masyarakat.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan bukanlah suatu harapan lagi, namun merupakan suatu tuntutan mendasar yang harus diwujudkan menjadi aktivitas operasional yang nyata adanya. Partisipasi masyarakat ini merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dalam memajukan pendidikan, baik dengan cakupan yang kecil dan besar sekalipun. Wibowo mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat terhadap sekolah, baik berwujud fisik maupun nonfisik akan memengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah sebagaimana penyelenggaraan pendidikan tersebut melibatkan berbagai komponen, baik manusia (pihak internal dan eksternal sekolah) maupun non manusia (proses pelaksanaan pendidikan) (Wibowo, 2013).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti yang berjudul “Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid”. Metode Penelitian kuantitatif. Variabel independen: akuntabilitas, transparansi pengelolaan dan partisipasi orang tua murid (X). Variabel dependen: model persamaan struktural akuntabilitas, transparansi pengelolaan APBS dan partisipasi orang tua murid (Y). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan

belanja madrasah mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi orangtua peserta didik dalam pembiayaan pendidikan.

Permasalahan yang penulis temui berdasarkan studi pendahuluan bahwasanya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah diduga masih kurang berjalan karena orangtua hanya mendapatkan selebaran kertas yang berisi pembayaran keuangan madrasah, oleh karena itu partisipasi orangtua peserta didik diperlukan agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat terlaksana dengan baik. Di samping itu apabila prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan di madrasah, maka dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orangtua dan warga madrasah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Akar masalahnya belum adanya partisipasi orangtua sehingga lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan dan dari fakta-fakta yang menunjukkan bahwa pada saat ini pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas sangatlah penting terutama dalam pengelolaan keuangan madrasah. Maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh mengenai “Pengaruh partisipasi orangtua peserta didik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi orangtua di Madrasah Aliyah Negeri se Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh partisipasi orangtua peserta didik terhadap transparansi di Madrasah Aliyah Negeri se Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh partisipasi orangtua peserta didik terhadap akuntabilitas di Madrasah Aliyah Negeri se Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh partisipasi orangtua peserta didik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah di Madrasah Aliyah Negeri se Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan partisipasi orangtua peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri se Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi orangtua peserta didik terhadap transparansi pengelolaan keuangan di Madrasah Aliyah Negeri se Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi orangtua peserta didik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di Madrasah Aliyah Negeri se Kota Bnadung.
4. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi orangtua peserta didik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah di Madrasah Aliyah Negeri se Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai pengaruh partisipasi orangtua peserta didik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah di Madrasah Aliyah Negeri se Kota Bandung ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan andil dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan partisipasi orangtua peserta didik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah, baik pada prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung maupun masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, pengajar maupun pihak yang ikut berkecimpung pada lembaga pendidikan, serta bagi penulis khususnya agar menyadari bahwa pentingnya mengetahui tentang pengaruh partisipasi orangtua peserta didik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah.

E. Ruang Lingkup Batasan Masalah

Untuk mengantisipasi terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan penelitian, maka peneliti perlu membatasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua variable yaitu variable terkait (Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah) dan Variable bebas (partisipasi orangtua peserta didik).
2. Pengaruh partisipasi orangtua peserta didik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah diukur dengan menggunakan kuisioner dan angket.
3. Objek penelitian dilakukan kepada kepala madrasah, tenaga pendidik dan kependidikan serta masyarakat.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan antar variabel- variabel yang hendak diteliti. Komponen utama dalam kerangka penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Madrasah (variabel Y) dan variabel bebas yaitu Partisipasi Orangtua Peserta Didik (variabel X). Selanjutnya variabel X (independen) tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap variabel Y (dependen) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

a. Pengertian Transparansi

Menurut Mardiasmo, prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Sama halnya dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, sekolah juga harus menjalankan pengelolaan keuangannya dengan memakai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi (Mardiasmo, Otonomi dan manajemen keuangan daerah, 2002).

Transparansi pengelolaan keuangan sekolah pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban horizontal antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga tercipta lembaga pendidikan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan bersama (Indra, Akutansi Yayasan dan Lembaga publik, 2006).

Sedangkan menurut Nico Andrianto, transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Nico Adrianto, 2007).

Dari beberapa pemaparan para tokoh mengenai definisi transparansi maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan antara para pemegang keputusan dengan pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu organisasi. Sedangkan transparansi keuangan sekolah adalah keterbukaan yang dilakukan oleh pihak madrasah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah khususnya dalam manajemen keuangan yang sumber dananya dapat diketahui dan dimanfaatkan sebagai informasi keuangan.

b. Indikator Transparansi

Menurut IDASA (*Institute for Democratic Alternatives in South Africa*) yang dikutip oleh Nico bahwa keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
 - a. Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.
 - b. Adanya kerangka kerja hukum yang memberikan definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
 - c. Adanya basis legal untuk pajak.
 - d. Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan pemungut pajak dari pemerintah daerah.
 - e. Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah.
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
 - a. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran).
 - b. Diumumkan setiap kebijakan anggaran.
 - c. Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
 - d. Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal.
 - e. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
3. Adanya audit yang independen dan efektif.
 - a. Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
 - b. Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
 - c. Adanya sistem peringatan dini dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
 - a. Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
 - b. Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran (Nico Adrianto, 2007).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan mengenai indikator pencapaian transparansi lembaga pendidikan (madrasah) melibatkan semua *stakeholder* dalam proses anggaran maupun kegiatan yang dilakukan di madrasah, memiliki sarana untuk menyumbangkan aspirasi *stakeholder*, dan memiliki aturan dalam pelaksanaan kegiatan.

c. Pengertian Akuntabilitas

Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan madrasah, maka pihak madrasah perlu mempertanggungjawabkan pemakaian sumber dana yang telah dikelola. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan peranggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Sukarsono, 2002).

Menurut E. Mulyasa menjelaskan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pada setiap akhir anggaran sekolah dengan dikeluarkannya dana selama satu tahun anggaran. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti oleh komponen sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah (Mulyasa, 2014).

Dari pemaparan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas didalam manajemen keuangan adalah penggunaan uang madrasah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua dan masyarakat.

d. Indikator Akuntabilitas

Terdapat beberapa tahapan untuk menjaminnya akuntabilitas terlaksana, yaitu:

1. Pada tahap proses pembuatan keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
 - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku.
 - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku.
 - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
 - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut (Sutedi, 2009).

2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikatornya:
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, maupun media komunikasi personal.
 - b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
 - c. Akses publik pada informasi atau suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
 - d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah (Sutedi, 2009).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator akuntabilitas merupakan ukuran yang dapat digunakan madrasah untuk menentukan tingkat kinerja dan membuat masyarakat madrasah puas dengan hasil yang dicapai oleh madrasah.

2. Partisipasi Orangtua Peserta Didik

a. Pengertian Partisipasi

Menurut Andriani (2018) Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Tujuan partisipasi adalah tuntutan dari masyarakat agar mereka harus diberdayakan, diberikan kesempatan, dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses- proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik (Fadli, 2013).

Cohen dan Uphoff dalam Siti Irine Astuti D (Cohen, 2009) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Orangtua dapat berperan serta dalam menyediakan dana, prasarana dan sarana madrasah sebagai upaya realisasi program-program madrasah yang telah disusun bersama. Orangtua yang memiliki pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan khusus dapat berperan serta dalam membantu madrasah seperti pada bidang proses pembelajaran, pengelolaan madrasah, dan pengelolaan keuangan madrasah. Intinya orangtua akan mau membantu madrasah jika pihak madrasah

mampu berkomunikasi dengan baik. Apabila madrasah bersikap transparan, terutama dalam hal keuangan dan orangtua diikutsertakan dalam pembicaraan rencana madrasah, maka sudah semestinya orangtua merasa ikut memiliki madrasah.

Oleh sebab itulah, pertemuan rutin dengan orangtua serta tokoh-tokoh masyarakat yang lain perlu ditingkatkan madrasah, sehingga masyarakat dan orangtua akan ikut memelihara dan membantu madrasah. Beberapa media lain yang dapat dimanfaatkan orangtua peserta didik untuk turut bertanggung jawab atas mutu pendidikan adalah melalui korespondensi surat atau telepon antara orangtua dengan madrasah, menyelenggarakan pertemuan antara paguyuban orangtua kelas. Atau, sebagai bagian dari komite madrasah, orangtua terlibat dalam kegiatan program madrasah, *home visiting*, menghadiri rapat madrasah, dan mengikuti pameran/bazar di madrasah. (Yulia, 2019)

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara transparansi, akuntabilitas dengan partisipasi orangtua peserta didik sangat berkaitan. Karena jika prinsip transparansi dan akuntabilitas di terapkan oleh madrasah, orangtua peserta didik akan lebih percaya kepada madrasah dan orangtua juga dapat menjadi daya dukung untuk memajukan madrasah tersebut.



Gambar 1 Skema Pengaruh Partisipasi Orangtua Peserta Didik Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Pengaruh Partisipasi Orangtua Peserta Didik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Madrasah

Transparansi
(Variabel Y1)
Indikator Trasparansi (Nico Adrianto, 2007)
Indikator keberhasilan transparansi sebagai berikut:

Keterangan:

- X : Partisipasi Orangtua Peserta Didik
- Y1 : Transparansi
- Y2 : Akuntabilitas
- : Pengaruh Variabel X dan Y



G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris dengan data.

1. Hipotesis Nol (H_0) : Tidak dapat pengaruh dalam Partisipasi Orangtua Peserta Didik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri se Kota Bandung.
2. Hipotesis Alternatif (H_a) : Terdapat pengaruh dalam Partisipasi Orangtua Peserta Didik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri se Kota Bandung.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Bagian ini menampilkan kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini serta menemukan perbedaannya, sebagai berikut:

1. Peneliti Denny Boy. Judul: Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orangtua Murid. Metode Penelitian kuantitatif. Variabel independen: akuntabilitas, transparansi pengelolaan dan partisipasi orang tua murid (X). Variabel dependen: model persamaan struktural akuntabilitas, transparansi pengelolaan APBS dan partisipasi orangtua murid (Y). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja madrasah mempunyai pengaruh positif terhadap partisipasi orangtua murid dalam pembiayaan pendidikan.
2. Peneliti Siti Roskina Mas. Judul: Partisipasi Masyarakat dan Orangtua dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Metode Kuantitatif Variabel independen: Penyelenggaraan Pendidikan (X). Variabel dependen: Partisipasi Masyarakat dan orangtua (Y). Hasil penelitian Peran masyarakat melalui komite dan dewan pendidikan memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat. Iklim demokratis dalam pengelolaan madrasah, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
3. Peneliti Yayan Yulianto Judul: Hubungan Antara Jenjang Pendidikan Orangtua dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Sosiologi Pada Siswa Kelas XI SMAN 1 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011. Metode Dekriptif Kuantitatif Variabel independen: jenjang pendidikan, motivasi belajar (X). Variabel dependen: Prestasi belajar (Y). Hasil penelitian Ada hubungan positif yang signifikan antara Jenjang Pendidikan Orangtua dengan Prestasi Belajar Sosiologi pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011.

4. Peneliti Irjani Pudjiastuti Judul: Persepsi Pemerintah Daerah Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Akuntabilitas Anggaran Metode Kuantitatif Variabel independen: Pemerintah Daerah (X). Variabel dependen: Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Akuntabilitas Anggaran (Y). Hasil penelitian Pemerintah Provinsi beranggapan bahwa selama ini masyarakat berperan secara aktif dalam upaya memberikan masukan, dan saran serta berperan aktif dalam proses penyusunan anggaran maupun memberikan masukan dalam revisi anggaran.
5. Peneliti Ardi Al-Maqassary. Judul: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan Di SMK Muhammadiyah Prambanan. Metode Kuantitatif Variabel independen: Transparansi dan Akuntabilitas (X). Variabel dependen: Pengelolaan dana pendidikan (Y). Hasil penelitian Pengelolaan dana madrasah dikategorikan cukup dalam melaksanakan transparansi dan mampu melaksanakan kebijakan yang akuntabilitas.

